



Vol. 1 | No. 3 | 2026

ASCIDIA

As'adiyah Multidisciplinary Proceedings

e-ISSN: 3047-4194

Available online at <https://journal.unisad.ac.id/index.php/ascidia>

Email: ascidia@unisad.ac.id

Kepemimpinan Politik Perempuan dan Demokrasi Inklusif: Membangun Keadilan Sosial Menuju Peradaban Indonesia Masa Depan

*Women's Political Leadership and Inclusive Democracy: Building Social Justice
Towards a Future Indonesian Civilization*

Nama Penulis

Firrawati Nasution
Fuad Syahputra Harahap

Afiliasi Penulis

UIN Sumatera Utara, Medan
UIN Sumatera Utara, Medan

Email Koresponden Utama: fitri.handayani@uinsu.ac.id

Abstrak

Makalah ini mengkaji kepemimpinan politik perempuan dan demokrasi inklusif sebagai fondasi untuk membangun keadilan sosial menuju peradaban Indonesia masa depan. Representasi perempuan dalam ranah politik formal masih rendah meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah diterapkan, sehingga diperlukan kajian mendalam tentang faktor penghambat dan strategi penguatan kepemimpinan politik perempuan. Melalui kajian konseptual dan tinjauan pustaka, artikel ini menganalisis kondisi representasi politik perempuan di Indonesia, kontribusi kepemimpinan perempuan akar rumput terhadap ketahanan demokrasi, serta strategi memperkuat demokrasi inklusif berbasis kesetaraan gender. Pembahasan mencakup kondisi keterwakilan politik perempuan, peran kepemimpinan perempuan akar rumput, dan strategi penguatan demokrasi inklusif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan kepemimpinan politik perempuan, baik di tingkat elite maupun akar rumput, berkontribusi signifikan terhadap terciptanya demokrasi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga negara.

Kata kunci: kepemimpinan politik perempuan, demokrasi inklusif, keadilan sosial, representasi politik, kesetaraan gender

Artikel ini telah dipresentasikan pada **Seminar Nasional Gender dan Peradaban** dengan tema *"Perempuan, Kepemimpinan, dan Keadilan Sosial: Membangun Peradaban Inklusif di Era Society 5.0."* pada 15 Juli 2026 diselenggarakan oleh **Pusat Studi Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam As'adiyah Sengkang**

Abstract

This article examines women's political leadership and inclusive democracy as a foundation for building social justice toward Indonesia's future civilization. Women's representation in formal politics remains low despite various affirmative policies, necessitating an in-depth study of inhibiting factors and strategies for strengthening women's political leadership. Through a conceptual study and literature review, this article analyzes the condition of women's political representation in Indonesia, the contribution of grassroots women's leadership to democratic resilience, and strategies for strengthening gender-equality-based inclusive democracy. The discussion covers the condition of women's political representation, the role of grassroots women's leadership, and strategies for strengthening inclusive democracy. Findings indicate that strengthening women's political leadership, both at the elite and grassroots levels, contributes significantly to creating a more inclusive, just democracy that is responsive to the needs of all citizens.

Keywords: *women's political leadership, inclusive democracy, social justice, political representation, gender equality*

Pendahuluan

Demokrasi yang sehat mensyaratkan representasi yang setara dari seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, dalam proses pengambilan keputusan politik. Aula (2022) menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, mulai dari norma sosial, stereotip gender, hingga implementasi kebijakan afirmatif yang belum optimal, sehingga partisipasi politik perempuan belum sepenuhnya mencerminkan proporsi populasi perempuan di Indonesia.

Kepemimpinan perempuan tidak hanya penting pada level elite politik nasional, tetapi juga pada level akar rumput yang menjadi fondasi ketahanan demokrasi. Subono (2025) dalam kajian tentang kepemimpinan perempuan di akar rumput dan ketahanan demokrasi menegaskan bahwa ketahanan demokrasi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh partisipasi elite politik, tetapi juga oleh sejauh mana kelompok marginal, termasuk perempuan, terlibat aktif dalam proses politik di tingkat komunitas.

Partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya di tingkat komunitas turut memperkuat kapasitas kepemimpinan politik perempuan secara lebih luas. Manalu, Subono, dan Daru (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam perhutanan sosial di berbagai provinsi memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, negosiasi, dan pengambilan keputusan kolektif, yang pada gilirannya memperkuat basis kepemimpinan politik perempuan di tingkat yang lebih tinggi.

Kajian literatur mengenai gender dan kepemimpinan menunjukkan bahwa perempuan pemimpin cenderung mengembangkan gaya kepemimpinan yang partisipatif dan kolaboratif. Baiduri, Hasanah, dan Maulana (2023) melalui kajian literatur tentang gender dan kepemimpinan mengungkapkan bahwa perempuan dalam posisi kepemimpinan sering menghadapi standar ganda dalam penilaian, namun gaya kepemimpinan kolaboratif yang mereka kembangkan justru terbukti efektif dalam membangun konsensus dan menyelesaikan konflik kepentingan di ruang publik.

Sejalan dengan pengambilan keputusan yang partisipatif, kepemimpinan perempuan Indonesia dalam konteks yang lebih luas menunjukkan karakteristik yang mengutamakan musyawarah. Sahban (2016) menegaskan bahwa pengambilan keputusan oleh pemimpin perempuan di Indonesia banyak diwarnai pendekatan musyawarah yang mengakomodasi berbagai kepentingan, sebuah karakteristik yang sangat relevan bagi penguatan demokrasi inklusif. Berdasarkan kelima pandangan tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana kepemimpinan politik perempuan dapat memperkuat demokrasi inklusif dan mewujudkan keadilan sosial menuju peradaban Indonesia masa depan, dengan pembahasan difokuskan pada kondisi representasi politik, peran kepemimpinan akar rumput, dan strategi penguatan demokrasi inklusif.

Pembahasan

1. Kondisi Representasi Politik Perempuan di Indonesia

Representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia masih jauh dari proporsional. Aula (2022) menunjukkan bahwa meskipun

kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan telah diterapkan dalam sistem kepartaian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk minimnya dukungan partai politik terhadap kaderisasi perempuan dan kuatnya norma patriarki dalam budaya politik.

Baiduri, Hasanah, dan Maulana (2023) menambahkan bahwa perempuan dalam posisi kepemimpinan politik kerap dinilai dengan standar ganda dibandingkan laki-laki, di mana ketegasan yang dianggap wajar pada pemimpin laki-laki justru dipersepsikan negatif ketika ditunjukkan oleh pemimpin perempuan. Kondisi ini menegaskan perlunya perubahan budaya politik yang lebih adil dalam menilai kapasitas kepemimpinan tanpa memandang gender.

2. Peran Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput dalam Ketahanan Demokrasi

Kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput memiliki peran strategis yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam kajian politik formal. Subono (2025) menegaskan bahwa partisipasi perempuan di tingkat komunitas menjadi fondasi penting bagi ketahanan demokrasi secara keseluruhan, karena keterlibatan kelompok marginal dalam proses politik lokal mencerminkan kualitas demokrasi yang lebih substantif dibandingkan sekadar prosedural.

Manalu, Subono, dan Daru (2022) memperkuat temuan ini melalui studi tentang partisipasi perempuan dalam perhutanan sosial, yang menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya komunitas memberikan ruang latihan kepemimpinan yang efektif, termasuk keterampilan negosiasi, mediasi konflik, dan pengambilan keputusan kolektif yang dapat ditransfer ke ranah kepemimpinan politik yang lebih luas.

3. Kepemimpinan Perempuan sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Gaya kepemimpinan perempuan yang partisipatif dan berbasis musyawarah memiliki relevansi kuat dengan upaya mewujudkan keadilan sosial. Sahban (2016) menunjukkan bahwa pemimpin perempuan di Indonesia cenderung mengedepankan pendekatan musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang

memungkinkan akomodasi kepentingan berbagai kelompok, termasuk kelompok rentan yang selama ini kurang terwakili dalam kebijakan publik.

Pendekatan kepemimpinan semacam ini menjadikan perempuan sebagai agen penting dalam mewujudkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, karena kepekaan terhadap kebutuhan kelompok marginal sering kali lebih menonjol dalam gaya kepemimpinan perempuan dibandingkan pendekatan kepemimpinan yang lebih hierarkis dan kompetitif.

4. Strategi Penguatan Demokrasi Inklusif Berbasis Kepemimpinan Perempuan

Penguatan demokrasi inklusif memerlukan strategi yang menyeluruh, mencakup reformasi kebijakan afirmatif partai politik, penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan sejak level akar rumput, serta perubahan budaya politik yang lebih adil dalam menilai kepemimpinan perempuan. Sintesis dari pandangan Aula (2022), Subono (2025), Manalu dkk. (2022), Baiduri dkk. (2023), serta Sahban (2016) menegaskan bahwa kepemimpinan politik perempuan, baik di level elite maupun akar rumput, merupakan komponen esensial bagi terwujudnya demokrasi yang inklusif dan keadilan sosial menuju peradaban Indonesia masa depan.

Simpulan

Kepemimpinan politik perempuan memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi inklusif dan mewujudkan keadilan sosial menuju peradaban Indonesia masa depan, baik melalui representasi di lembaga formal maupun kepemimpinan di tingkat akar rumput yang menjadi fondasi ketahanan demokrasi. Gaya kepemimpinan perempuan yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis musyawarah terbukti efektif dalam mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan yang selama ini kurang terwakili. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan politik perempuan perlu terus didorong melalui reformasi kebijakan afirmatif, penguatan kapasitas sejak level komunitas, dan perubahan budaya politik yang lebih adil, sehingga

demokrasi Indonesia dapat menjadi semakin inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Referensi

- Aula, F. (2022). Keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia: Tantangan dan strategi pengarusutamaan gender. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 6(2), 150–167.
- Baiduri, I., Hasanah, N., & Maulana, F. (2023). Gender dan kepemimpinan: Sebuah kajian literatur. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(2), 179–204.
- Manalu, A. G. B., Subono, N. I., & Daru, R. D. (2022). Partisipasi perempuan dalam perhutanan sosial: Studi kasus di lima provinsi. *Jurnal Perempuan*, 27(1), 163–191.
- Sahban, H. (2016). Peran kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 56–71.
- Subono, N. I. (2025). Kepemimpinan perempuan di akar rumput dan ketahanan demokrasi: Kajian pengantar teoretis. *Jurnal Perempuan*, 29(3), 259–272. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i3.1185>